

Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang – undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 , tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang pedoman pengembangan Budaya Kerja;
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2018 tentang Budaya Pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 73);
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Budaya Pemerintahan (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 53);
8. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 76 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan Reformasi Birokrasi (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 77);
9. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2018 tentang Budaya Pemerintahan di Pemerintah Kota Yogyakarta;
10. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2020 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta .

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK BUDAYA PEMERINTAHAN .**
- KESATU** : Membentuk Kelompok Budaya Pemerintahan dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Kepala Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta.
- KEDUA** : Kelompok Budaya Pemerintahan adalah kelompok kerja untuk mempercepat proses internalisasi dan implementasi nilai-nilai Budaya Pemerintahan di SKPD / Unit kerja .
- KETIGA** : Tugas tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. Menyusun rencana aksi (action plan) Implementasi Budaya Pemerintahan;
 - b. Menyelenggarakan internalisasi nilai – nilai Budaya Pemerintahan;
 - c. Melakukan upaya meningkatkan pemahaman dan menyamakan persepsi dalam mengimplementasikan nilai-nilai Satriya;
 - d. Melakukan inventarisasi permasalahan yang terjadi di lingkungan kerjanya dan melakukan upaya untuk mencari pemecahan/jalan keluar yang terbaik;

- e. Melakukan langkah-langkah yang diperlukan sebagai tindak lanjut hasil evaluasi;
- f. Menyusun laporan pelaksanaan rencana aksi (action plan) implementasi Budaya Pemerintahan;
- g. Berkoordinasi dengan SKPD/Unit kerja yang membidangi bidang keorganisasian untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Budaya Pemerintahan;
- h. Laporan pelaksanaan rencana aksi (action plan) disampaikan kepada Kepala Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT

: Dalam melaksanakan tugasnya, kelompok Budaya Pemerintahan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada Tanggal 1 Maret 2021

KEPALA,



[Handwritten Signature]
AFIA ROSDIANA

Lampiran : Keputusan Kepala Bagian Umum dan
Protokol Setda Kota Yogyakarta.
Nomor : 188 / 150 / KEP / 2021
Tanggal : 1 Maret 2021

SUSUNAN KELOMPOK BUDAYA PEMERINTAHAN
TAHUN 2021

No.	JABATAN DALAM TIM	NAMA
I	PENANGGUNG JAWAB	AFIA ROSDIANA, M.Pd.
II	KETUA	SRI ARIKA WAHYUNINGSIH, S.I.P.
III	SEKRETARIS	KARJONO, A.Md.
IV	ANGGOTA	DWIANTO SUPAHAM, S.E.
		ANNA FARDIANA, S.S.
		NUR MUGIARTI
		DINA AGUSTIN
		YAMHARI, A.Md.
		WAHYUDI
		TRİYANTA BUDI YUWONO, SH
		ANDRI PURWANTA, S.Pd.T.
		RATIH PERMANA SARI, S.H., M.A., M.A.P.
		HYANWISNHU JATI YUDO PRAWIRO, S.H.
		WIBOWO SULISTYO NUGROHO, SPd

KEPALA,

AFIA ROSDIANA

